

**ANALISIS KASUS SENGKETA KEPERDATAAN KEPEMILIKAN
TANAH YANG BERSERTIFIKA GANDA (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Kabanjahe Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Kbj)**

YESICHA CRISTIANITA GINTING

ABSTRACT

Etimologically, certificate comes from Dutch “Certificat” which means evidence letter or a clarification letter that proves something. In the Kabanjahe District Court’s Ruling Number 30/Pdt.G/2009/Kbj Ishak Charlie files a complaint on Land Title with good faith in which there are doubled land title certificates with different areas and borders and Ishak Charli claims that he has purchased the land in accordance with the existing procedures. The research type is normative. The research is descriptive analysis. In Kabanjahe District Court’s Ruling Number 30/Pdt.G/2009/Kbj, it is stated that the claim is void due to the incomplete claimed subject so that Ishak Charlie does not obtain justice in his claim despite witnesses and documents that have been proven in the District Court, the certificate possessed by Ishak Charlie has been pronounced annulled before law by State Administrative Court and the valid certificate that is recognized by the State Administrative Court is the one that belongs to Syamsuddin Arifin.

Keywords: Civil Dispute over Doubled Land Title Certificates

I. Pendahuluan

Secara etimologi sertipikat berasal dari bahasa Belanda “Certificat” yang artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu. Jadi kalau dikatakan sertipikat tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain kenyataan tersebut menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang-bidang tanah tertentu dan pemilikan itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang dibuat oleh instansi yang berwenang inilah yang disebut sertipikat tanah tadi.¹

¹ Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, 2008, hal. 198

UUPA menganut sistem negatif, sehingga keterangan yang tercantum didalam surat bukti hak mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Jika terjadi hal demikian maka pengadilan akan memutuskan alat pembuktian mana yang benar. Pendaftaran tanah tidak menyebabkan mereka yang tidak berhak menjadi berhak atas suatu bidang tanah hanya karena namanya keliru dicatat sebagai yang berhak. Mereka yang berhak dapat menuntut diadakannya pembetulan dan jika tanah yang bersangkutan sudah berada didalam penguasaan pihak ketiga, ia berhak menuntut penyerahan kembali kepadanya.²

Pendaftaran tanah memiliki arti penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia seperti yang ditegaskan dalam Pasal 19 UUPA bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah yang bersifat recht cadastre³ diseluruh wilayah Republik Indonesia. Perbuatan hukum pendaftaran tanah menyangkut dengan hak keperdataan seseorang. Hak keperdataan merupakan hak asasi seorang manusia yang harus kita junjung tinggi dan hormati oleh sesama manusia lainnya yang bertujuan untuk adanya kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penerbitan sertifikat diperlukan suatu proses yang melibatkan pihak pemohon, para pemilik tanah yang bersebelahan, Pamong Desa maupun pihak instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan dan surat-surat sebagai alas

² Hasan Kusumah, *Hukum Agraria I*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 77.

³ Recht Cadaster adalah pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah, sedangkan bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat didaftarkan dengan tujuan menetapkan siapa yang berkewajiban membayar pajak atas tanah

hak yang berhubungan dengan permohonan sertifikat tersebut. ”Penjelasan baik lisan maupun tertulis dari pihak terkait memiliki peluang untuk terjadinya pemalsuan, daluwarsa bahkan adakalanya tidak benar atau fiktif sehingga timbul sertifikat cacat hukum.”⁴

Untuk mencegah terjadinya kepemilikan ganda dengan memperhatikan proses pendaftaran dengan melihat kelengkapan bukti asal usul atau riwayat tanah dalam pengurusan surat kepemilikan hak atas tanah maupun bangunan untuk rumah tinggal atau tempat usaha, diperlukan bukti-bukti tentang riwayat atau asal usul tanah dan rumah yang dimintakan bukti surat kepemilikannya tersebut. Asal usul atau riwayat tanah dapat berupa hak turun temurun karena waris, atau bukti peralihan hak karena sebab hibah, jual beli, sewa tanah atau pemberian hak dari Negara.

Ringkasan kasus dari perkara tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Bapak Pasang Ginting (PG) menggarap tanah sejak tahun 1949 sampai dengan tahun 1992 yang pada tahun tersebut Bapak PG menaikkan tingkat Surat Keterangan Garapan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa pada tahun 1991 bahwasanya Bapak PG telah menggarap di tanah tersebut dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1992. Pada tahun 1990 tanah tersebut pernah digugat oleh Iwan Kuasa Purba berdasarkan Hak Guna Bangunan, namun Hak Guna Bangunan tersebut sudah habis dan Iwan Kuasa tersebut kalah oleh para penggarap sampai ke tingkat Mahkamah Agung, maka setelah dari gugatan tersebut Bapak BG membuat surat atas tanahnya seluas kurang lebih 4.067 M2 (empat ribu

⁴ Ibid, hal. 25.

enampuluh tujuh meter persegi). Pada saat Bapak BG meninggal dunia tanah tersebut beralih ke Ahli Waris yaitu David Ginting (DG), oleh DG tanah tersebut dijual ke Bapak Charlie Ishak (CI) dengan Akta Jual Beli No. 622/AJB/VI/07/2001 tertanggal 06 (enam) Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Darwin Sjam Manda, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 63/Desa Jaranguda tertanggal 28 (duapuluh delapan) Oktober 1991 (seribu sembilanratus sembilanpuluh satu) , luas 4.067 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pendidikan;
- d. Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Pasang Ginting, sekarang tanah Sarno;

Tanah tersebut telah beralih ke CI sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan PP. 24 tahun 1997. Namun sejak kurun 5 tahun terbitnya tidak ada pihak manapun yang menuntut bahwa tanah tersebut telah timbul sertifikat Hak Milik. Timbul masalah setelah lewat dari 5 tahun bahwa tanah tersbut telah ada yang memiliki dengan Sertifikat Hak Milik No. 24/Jaranguda , tertanggal 23 (duapuluh tiga) September 1986 (seribu sembilanratus delapanpuluh enam), dimana mengenai luas, bentuk ukuran dan batas-batas serta letak tanah. Secara nyata jauh berbeda dengan Sertifikat Hak Milik No. 63/Jaranguda tahun 1992. Dalam kasus ini telah terbit 2 sertifikat tanah yang belum diketahui siapa pemilik aslinya apabila dilihat dari kepemilikan pertama telah terbit sertifikat dan dibebankan dengan Hak Tanggungan Nomor.3585 tertanggal 15 Oktober 1996

pada sertifikat Hak Milik No, 24/Jaranguda tertanggal 23 September 1986 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan kepemilikan kedua didapat berdasarkan Jual Beli yang sah.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah pemilikan tanah yang beritikad baik telah terlindungi atas adanya putusan No.30/Pdt.G/2009/PN.Kbj?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara gugatan penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.30/Pdt.G/2009/PN.Kbj?
3. Bagaimana akibat hukum dari putusan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.30/Pdt.G/2009/PN.Kbj?

II. Metode Penelitian

Penelitian (research) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁵ Usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian.⁶ Sebagai suatu penelitian yang ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian diawali dengan pengumpulan data sehingga analisis data yang dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁵ Muslam Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hal.91

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1973, hal 5

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis artinya yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif, Penelitian metode Yuridis Normatif ialah dengan menggunakan “pendekatan perundang-undangan (statue approach)”.⁸ Yang memfokuskan pengumpulan semua perundang-undangan yang terkait dengan sertifikat ganda, kemudian menganalisa baik yang tertulis di dalam buku, melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan hukum dan implikasi pelaksanaannya di Indonesia maupun hukum yang diputuskan melalui proses pengadilan.

3. Sumber Data

Penelitian ini menitik beratkan pada studi kepustakaan. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dari arsip-arsip, bahan pustaka data resmi pada Instansi Pemerintah, Undang-undang, makalah yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, yang terdiri dari:

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 87

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1997, hal 39

- a. Bahan Hukum Primer,⁹ yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu : Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Peraturan perundang-undangan Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
- b. Bahan Hukum Sekunder¹⁰ yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa buku, hasil-hasil penelitian, tulisan atau pendapat pakar-pakar hukum.
- c. Bahan Hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam hal melakukan Perjanjian Jual Beli hak atas tanah terkhususnya Hak Milik Tanah berdasarkan kedudukannya terbagi menjadi tanah yang bersertipikat dan tanah yang belum bersertipikat. Tanah yang bersertipikat adalah tanah yang memiliki hak dan telah terdaftar di kantor pertanahan sedangkan tanah yang belum bersertipikat merupakan tanah yang belum memiliki hak tertentu dan status tanahnya masih merupakan tanah negara. Dalam pembuatan dokumen tanah untuk bisa berlangsungnya penerbitan akta, yang harus dipersiapkan ialah sertifikat tanah apabila belum adanya sertifikat maka penggantinya adalah bukti lain yang dikuatkan oleh Surat Keterangan Lurah dan Camat setempat mengenai kebenaran

⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 55

¹⁰ Ibid

kepemilikan atas tanah.¹¹ Dalam hal ini perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah yang dilakukan ialah Perjanjian Jual Beli hak atas Tanah Milik yang telah terbit sertifikat hak miliknya pada satu bidang tanah.

Berdasarkan akta Jual Beli Nomor 622/AJB/VI/07/2001 tertanggal 06 Juni 2001 yang diperbuat dihadapan Notaris Darwin Sjam Manda selaku PPAT Wilayah Kabupaten Karo, Penggugat telah membeli sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya dari ahli waris Pasang Ginting seluas kurang lebih 4.067 M2 yang terletak di desa Jaranguda, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dengan sertifikat Hak Milik nomor 63/Desa Jaranguda tertanggal 28 Oktober 1991. Sejak terjadinya jual beli tersebut tanah dan bangunan tersebut tidak pernah satu orang pun yang telah melakukan jual beli atas tanah objek perkara kecuali penggugat.

Perolehan hak yang dimiliki Ishak Charli terhadap sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya seluas kurang lebih 4.067 M2 yang terletak di desa Jaranguda, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera adalah melalui tata cara dan mekanisme prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang ditemukan dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (yaitu ketentuan pasal 23 s/d 26 dan pasal 29 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 dan Pasal 30 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997), maka sepatutnya Ishak Charli dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan berhak penuh terhadap sebidang tanah seluas kurang lebih 4.067 M2, beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di desa Jaranguda, Kabupaten

¹¹ Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda Teori dan Praktik Pendaftaran Tanah di Indonesia*, cetakan I, Mandar Maju, Bandung 2004, hal 224

Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan alas hak kepemilikan Ishak Charli berupa sertifikat Hak Milik nomor 63/Desa Jaranguda tertanggal 28 Oktober 1992 terdaftar atas nama Ishak Charli.

Sejak diterbitkannya sertifikat Hak Milik nomor 63/Desa Jaranguda tertanggal 28 Oktober 1992 s/d tahun 2003 ternyata tidak pernah ada pihak manapun termasuk Syamsyudin Arifin yang mengajukan keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 63/Desa Jaranguda tersebut maka menurut ketentuan hukum positif sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Jaranguda yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo lebih dari 5 (lima) tahun lamanya, hal mana adalah merupakan bukti kepemilikan yang sah, sehingga oleh karenanya apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut oleh instansi yang berwenang untuk itu tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut sebagai alas hak yang sah dari suatu bidang tanah berikut dengan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, maka secara yuridis hal mana menunjukkan secara hukum bahwasanya tidak ada upaya hukum maupun bukti surat apapun yang dapat melumpuhkan/melemahkan sertifikat hak miliki nomor 63/Desa Jaranguda atas nama Ishak Cahrлие;

Syamsuddin Arifin mengatakan bahwa atas tanah objek perkara telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 24/Jaranguda tertanggal 23 September 1986 atas nama Syamsuddin Arifin adalah keliru, karena terhadap tanah objek perkara sebagaimana tersebut pada Sertipikat Hak Milik Nomor 63/Desa

Jaranguda tertanggal 28 Oktober 1992, sebelumnya tidak pernah dilakukan jual beli oleh ahli waris Pasang Ginting terkecuali dengan Ishak Charlie sebagaimana tersebut akta jual beli nomor 622/AJB/VI/07/2001 tertanggal 6 Juni 2001 yang diperbuat dihadapan Notaris Darwin Sjam Manda selaku PPAT wilayah Kabupaten Karo dan telah dibaliknama ke atas nama Ishak Charli.

Berdasarkan hal tersbut diatas, telah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1230 K/Sip/1982, tanggal 29 Maret 1982 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3201/K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996, Ishak Charli adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi Undang-Undang, sehingga patut bila Ishak Charli mohon dinyatakan demi hukum Ishak Charli adalah sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum.

Fakta hukum membuktikan Sertipikat Hak Milik nomor 24/Jaranguda tertanggal 23 September 1986 atas nama Syamsuddin Arifin mengenai luas, bentuk, ukuran tanah serta batas-batas dan letak tanah yang diakui oleh Syamsuddin Arifin tidak jelas, sedangkan Sertipikat Hak Milik nomor 63/Jaranguda tertanggal 28 Oktober 1992 atas nama Ishak Charli secara nyata jauh berbeda, baik luas maupun letaknya dengan sertipikat Hak Milik nomor 24/Jaranguda tertanggal 23 September 1986 milik Syamsuddin Arifin dan Syamsuddin Arifin sampai saat ini tidak pernah menguasai secara fisik tanah yang disebutkan sebagai miliknya.

Syamsuddin Arifin bukan sebagai pemilik yang sah dan berhak penuh terhadap tanah objek perkara sebagaimana tersebut sertipikat Hak Milik nomor

63/Desa Jaranguda tertanggal 28 Oktober 1992, maka perbuatan Syamsuddin Arifin yang menyatakan diatas tanah milik Ishak Charli telah lebih dahulu terbit sertipikat Hak Milik nomor 24/Jaranguda tertanggal 23 September 1986 atas nama Syamsuddin Arifin dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) kepada Ishak Charli, dengan demikian karena Syamsuddin Arifin mengakui di atas tanah milik Ishak Charli yang terlebih dahulu diterbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 24/Jaranguda tertanggal 23 September 1983 atas nama Syamsuddin Arifin, akan tetapi mengenai luas, bentuk ukuran dan batas-batas serta letak tanah, secara nyata jauh berbeda dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 63/Jaranguda tertanggal 28 Oktober 1992 milik Ishak Charli.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Kbj ialah penggugat tidak mendapatkan putusan yang adil karena kurang lengkapnya subyek gugatannya sehingga gugatannya tidak diterima Majelis Hakim sehingga sertipikat tersebut tidak mendapatkan kejelasan statusnya batal atau masih berlaku dalam Putusan tersebut. Namun dengan adanya putusan Majelis Hakim PTUN yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik nomor 63 tanggal 28 Oktober 1992 atas nama Ishak Charli yang dinyatakan batal demi hukum dan yang berlaku ialah sertipikat yang dimiliki oleh Syamsuddin Arifin sertipikat hak milik nomor 24 tahun 1986.

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan dalam uraian di atas maka dapat disimpulkan:

1. Pemilikan tanah yang beritikad baik belum terlindungi dalam putusan ini dikarenakan prosedur dalam putusan akhir dari gugatan nomor 30/Pdt.G/2009/PN. Kbj ialah bahwa tergugat tidak lengkap yaitu ahli waris Pasang Ginting sehingga Putusannya tidak diterima. Sehingga dalam hal ini hakim belum memutuskan perkara yang diajukan Ishak Charli berhubung karena subyek tergugat tidak lengkap. Meskipun telah membeli tanah dengan itikad baik tetapi pihak ketiga dapat membuktikan tanah terperkara miliknya masih dapat diajukan gugatan karena pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem negatif berunsur positif dimana setiap orang yang memiliki hak milik atas tanah dapat digugat oleh penggugat apabila dapat membuktikan sertifikat tanah itu miliknya.
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara gugatan nomor 30/Pdt.G/2009/PN. Kbj ialah agar dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe Ishak Charlie juga mengikutsertakan ahli waris Pasang Ginting sebagai Tergugat dikarenakan kurangnya para pihak dalam mengajukan gugatan tersebut maka gugatan Ishak Charli tidak diterima oleh Hakim.
3. Akibat Hukum dalam gugatan nomor 30/Pdt.G/2009/PN. Kbj ialah dikarenakan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan maka gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Hakim.

2. Saran

1. Setiap pemilik beritikad baik mendapatkan perlindungan hukum dalam pendaftaran tanah apabila telah mengajukan gugatan dengan prosedur yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kurang subyek dalam mengajukan gugatan tersebut .
2. Agar Ishak Charlie memperbaiki surat gugatannya dengan melengkapi dan menarik Ahli Waris Pasang Ginting yang belum diikutsertakan dalam gugatan tersebut sehingga surat gugatan tersebut tidak mengandung cacat dan dalam membuat surat gugatan hendaknya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta cermat dalam menyusun surat gugatan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.
3. Agar Ishak Charli kembali mengajukan permohonan gugatan kembali dengan menggugat juga ahli waris Pasang Ginting sehingga Hakim dapat menerima gugatan tersebut.

V. Daftar Pustaka

Abdurrahman Muslam , *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1973

Hermit Herman, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda Teori dan Praktik Pendaftaran Tanah di Indonesia*, cetakan I, Mandar Maju, Bandung 2004

Soemitro Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988

Sunggono Bambang , *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1997

Lubis Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim , *Hukum Pendaftaran Tanah*,
Mandar Maju, 200

Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung,
2008

Kusumah Hasan , *Hukum Agraria I*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1995